

RESEARCH ARTICLE

# Sila Ketiga Pancasila Fondasi Dalam Menyukseskan Demokrasi Inklusif (Sebagai Upaya Menangkal Politik Identitas)

Tobias Kardiman ✉

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

✉ tobiasosm@gmail.com

## ABSTRACT

*The focus of this article is the third principle of Pancasila as the foundation for the success of inclusive democracy in Indonesia. Pancasila democracy is recognized as a pillar in countering various views that could threaten the integrity of the nation. Unfortunately, in Indonesia's democratic system, inclusive democracy is not fully guaranteed. Nowadays, we are shocked by the movements of criminal groups that are dividing Indonesia's unity. Responding to this problem, Pancasila as the basis of the state, especially the third principle, is very important in democracy, an important step to maintain diversity and create unity in differences, so that elections can become an empowering and equitable vehicle for all Indonesian citizens. This article uses a bibliographic method, analyzing the results of previous studies from books and articles that are relevant to the theme. The results of the study show that democracy based on the principles of Pancasila provides space for dialogue and maintains the integrity of the nation and the unity of Indonesia. This article aims to increase public and government awareness in making elections a success and a sense of concern for each other. By understanding the role of the Third Principle, it is hoped that we can create an inclusive democracy.*

**Keywords:** *Democracy, Inclusion, Pancasila, Unity*

## ABSTRAK

Fokus tulisan ini adalah sila ketiga pancasila sebagai fondasi dalam menyukseskan demokrasi inklusif di Indonesia. Demokrasi Pancasila diakui sebagai pilar dalam menangkal berbagai pandangan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Sayangnya, dalam sistem demokrasi Indonesia, demokrasi inklusif tidak sepenuhnya terjamin. Dewasa ini dikejutkan oleh gerakan kelompok kriminal yang memecah belah persatuan Indonesia. Menanggapi persoalan itu maka pancasila sebagai dasar negara khususnya sila ketiga sangat penting dalam demokrasi, langkah penting untuk menjaga keberagaman dan mewujudkan persatuan dalam perbedaan, sehingga pemilu dapat menjadi wahana yang memberdayakan dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan, menganalisis hasil studi terdahulu dari buku-buku dan artikel yang relevan dengan tema. Hasil studi menunjukkan bahwa demokrasi berlandaskan asas pancasila memberikan ruang untuk berdialog dan menjaga keutuhan bangsa serta persatuan

Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menyukseskan pemilu serta rasa kepedulian terhadap satu sama lain. Dengan memahami peran Sila Ketiga, diharapkan dapat menciptakan demokratis yang inklusif.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Inklusif, Pancasila, Persatuan

## PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menjadi pilar dalam pembentukan dan pemeliharaan demokrasi jujur, damai, adil.<sup>1</sup> Pembicaraan tentang demokrasi bukan dalam perspektif kerakusan, dalam bahasa Machiaveli demokrasi dimasukkan dalam perkara di luar wilayah wajar etika. Siapa menang berkuasa, siapa kalah pecundang. Perlu disadari bahwa demokrasi haruslah berlandaskan pada kehidupan bersama, demi kepentingan bersama untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Dalam hal ini prinsip demokrasi adalah penegasan serta penghargaan terhadap hukum martabat luhur manusia sehingga bebas dan secara positif menyampaikan pendapat, memilih pemimpin tanpa merasa beban.<sup>3</sup> Dengan demikian sistem demokrasi dari rakyat, oleh dan untuk rakyat semakin terwujud dan terasa dikalangan masyarakat. Sehingga kebersamaan mencetuskan nilai kerarifan lokal yang menjadi milik manusia Indonesia. Kearifan lokal itu identik dengan kebersamaan yang dijunjung tinggi dan tidak lekang oleh waktu.<sup>4</sup> Demokrasi mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan bersama yang inklusif.

Akan tetapi sistem demokrasi Indonesia, demokrasi inklusi tidak sepenuhnya terjamin karena kurangnya penghayatan nilai pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dewasa ini dikejutkan oleh gerakan kelompok kriminal yang memecah belah persatuan Indonesia.<sup>5</sup> Ada sekian banyak partai politik dan kelompok agama yang berusaha menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Tindakan penyelewengan kekuasaan, kasus-kasus korupsi perilaku tak etis politisi selalu ada, dan hal-hal negatif lainnya dari dunia politik bisa dilihat secara blak-blakan di segala media.<sup>6</sup> Selain itu penyebaran hoaks isu politik identitas sering terjadi yang menyebabkan terjadinya persolan baru dalam masyarakat. Hal yang memprihantinkan adalah orang-orang beragama yang dianggap suci justru menjadi biang kejahatan yang tersembunyi dibalik kebaikan.

Prinsip demokrasi pancasila dijadikan sebagai topeng untuk menutupi keegoisan segelintir orang. Penyelewengan kekuasaan, kasus korupsi, perilaku tak etis politisi, dan

<sup>1</sup> T. Krispuwana Cahyadi, Yohanes Paulus II Tentang Keadilan dan Perdamaian (Jakarta: Fidei Pres 2011), 43.

<sup>2</sup> Armada Riyanto, Berfilsafat Politik (Yogyakarta: kanisius, 2014), 16.

<sup>3</sup> R. Arie Febrianto, Implementasi Sila Ketiga Pancasila Butir Ke 6 Mengembangkan Persatuan Indonesia Atas Dasar Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Sehari-Hari Terkait Informasi Teknologi Adil Indonesia *Journal Volume 4 No 1 Januari 2023: 65-70*.

<sup>4</sup> Armada Riyanto, *Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku teks, Liyan dan Fenomen*, (Yogyakarta: Kanisius 2018), 13.

<sup>5</sup> Antonius Dieben Robinson, *Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi dan Spiritualitas Bangsa* (Bekasi: Media Maksima 2021), 129.

<sup>6</sup> B. Haryanto, "The Role of Pancasila Values in Shaping Indonesia's Foreign Policy: A Study of Indonesia's Relations with Neighboring Countries." *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(4), 2021, hlm, 567-583.

dampak negatif lainnya dari dunia politik dapat dengan mudah ditemui di berbagai media, termasuk media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dewasa ini. Bangsa Indonesia, seiring berjalannya waktu, terperangkap dalam propaganda klasik yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan satu sama lain.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, Sila Ketiga Pancasila tentang persatuan menjadi krusial. Meskipun ideologi Pancasila telah diakui sebagai pengikat seluruh elemen bangsa untuk mencapai cita-cita bersama, pelaksanaannya, terutama dalam Sila Ketiga, menghadapi berbagai kendala dan persoalan. Dinamika publik seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik dan kekuasaan, mengaburkan esensi dari persatuan yang seharusnya diwujudkan. Menanggapi persoalan itu maka demokrasi pancasila semestinya dipraktikkan secara terbuka dan berusaha menghindari tindakan-tindakan sembrono yang mengganggu harmoni keutuhan bangsa. Upaya orang untuk menempatkan nilai-nilai demokrasi Pancasila sebagai pilar utama dalam ranah politik menjadi suatu keharusan.<sup>8</sup> Dalam menghadapi ancaman politik identitas yang dapat merugikan demokrasi inklusif, refleksi mendalam terhadap nilai-nilai pancasila, khususnya sila ketiga, menjadi hal utama dan penting. Nilai kesatuan dan persatuan menjadi fondasi untuk meraih kesuksesan demokrasi yang sejati dan merata. Upaya yang dilakukan dalam mencapai demokrasi yang inklusif adalah melahirkan kader-kader individu yang tidak hanya memahami, tetapi juga sadar akan kebutuhan, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.<sup>9</sup> Kesadaran ini menjadi pendorong bagi masyarakat untuk aktif menerapkan dan melestarikan nilai-nilai pancasila, menciptakan landasan yang kokoh untuk mempertahankan demokrasi yang inklusif dan berdaya guna.<sup>10</sup> Dengan demikian kebersamaan yang pluralitas suku, agama dan budaya terus dipertahankan dan masyarakatpun mampu saling menerima satu sama lain, merayakan perbedaan, serta sikap toleransi yang semakin meningkat.

### Rumusan Masalah

1. Apakah sila ketiga pancasila menjadi fondasi dalam menyukseskan demokrasi inklusif?
2. Mengapa sila ketiga pancasila dapat menjadi fondasi untuk menjaga demokrasi inklusif di tengah tantangan politik identitas?
3. Bagaimana implementasi nilai-nilai sila ketiga pancasila dapat mencegah polarisasi politik berbasis identitas dalam sistem demokrasi Indonesia?

### Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan, yaitu menganalisis hasil penelitian terdahulu dari buku-buku dan artikel yang relevan dengan tema yang

---

<sup>7</sup>Severinus Temi Laga, Pancasila Ikatan Bineka Tunggal Ika, *Jurnal Filsafat teologi sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya sasana*, Vol.46, No.2/2017: 94-105.

<sup>8</sup>“Luh Suryatni, Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 34–47, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.101>.

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Jelita Siahaan, Raras Agustina, Reodiva Jonandes, Riska Fitriyono, Pancasila Sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi III, Desember 2022*, 9, no. November (2022): 8.

dibahas. Melalui pendekatan ini, penulis memiliki gambaran umum tentang demokrasi pancasila dan pengaruhnya terhadap dinamika politik di tanah air. Dengan merinci hasil penelitian yang relevan, tulisan ini berupaya memberikan wawasan dan memberikan tawaran efektif berupa tulisan dalam menyukkseskan demokrasi sehingga kedamaian, prinsip kesatuan dapat terwujud. Selain itu kesadaran dalam menghargai perbedaan semakin ditingkatkan, dan semakin berani untuk memperjuangkan martabat luhur manusia yang masih terbelenggu oleh ego segelintir penguasa demi kepentingan pribadi, seperti kerakusan, politik identitas dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pancasila Fondasi Dalam Menyukkseskan Demokrasi Inklusif

Dewasa ini dikejutkan oleh gerakan kelompok kriminal yang memecah belah persatuan indonesia. Banyak partai politik yang berusaha menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Bangsa Indonesia sudah lama terhanyut dalam propoganda klasik yang sengaja dilakukan bertujuan menjatukan sesama.<sup>11</sup> Dalam tataran Ide atau gagasan pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita sudah final. Namun sayangnya dalam sejarah perjalanan bangsa sejak kemerdekaan hingga kini pelaksanaan nilai luhur pancasila mengalami, hambatan, kekeliruan dll. Terutama disebabkan oleh dinamika publik yang menyalagunkan pancasila untuk menyusun kekuasaan dan kepuasan pribadi.<sup>12</sup>

Indeologi bangsa dan negara yang sarat dengan nilai-nilai luhur sekedar dijadikan sarana pemburu kekuasaan dengan mengingkari pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah rentannya para pemegang kekuasaan terhadap godaan kekuasaan. Melalui sejarah perjalanan bangsa dapat lebih muda ditelusuri mulai dari rejim-rejim orde lama, orde baru serta orde reformasi, pada awalnya, rejim-rejim selalu beretorika bertekad melaksanakan pancasila.<sup>13</sup> Akan tetapi dalam perjalanannya rejim-rejim tersebut tumbang atau gontai karena manipulasi pancasila untuk kepentingan kekuasaan. Penyelewengan terhadap pancasila merupakan ham berat yang terjadi pada masa lampau. Nilai luhur martabat manusia diabaikan karena kepentingan pribadi atau kekuasaan. Kekuasaa yang hakikatnya cenderung korupsi (merusak tatanan), terbukti telah memudarkan nilai-nilai luhur pancasila. Ironinya tokoh sentral yang menjadi korban revolusi adalah penggali dan penggagas pancasila itu sendiri.<sup>14</sup> Tragedi politik tahun 1965 yang pada dasarnya adalah perang saudara yang disebabkan oleh konflik ideologi. Tragedi bangsa yang menelan ratusan ribu korban, trauma luka batin serta stigma politik bagi jutaan rakyat yang tidak tahu menahu apa yang disebut memperjuangkan revolusi. penderitaan masyarakat kecil sebagai

---

<sup>11</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Kebinekaan, Masyarakat Indonesia, Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, (Jakarta Pt Grasindo, 2000), 4-7.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> J. Kristiadi, *Mewujudkan kehidupan Politik yang Bermartabat Berdasarkan Pancasila*, ed. Armada Riyanto dkk, dalam *Kearifan Lokal Pancasila, Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 595.

<sup>14</sup> Annisa Sabilla and Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Ranah Politik," *EduPsyCouns Journal* 3 (2021): 154–62.

konsekuensi dari tindakan smbrono segelintir penguasa masih membias dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Mengapai persoalan ini maka penulis menawarkan pentingnya kesadaran manusia Indonesia untuk mengembangkan dan menghidupi norma yang dijabarkan dalam Pancasila benar-benar menjadi bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari seluruh hidup masyarakat Indonesia. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, memainkan peran sentral dalam mendukung demokrasi inklusif di Indonesia melalui ajaran Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari kearifan lokal mencerminkan keterkaitan yang mendalam dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia.<sup>15</sup> Sebagai pedoman hidup, Pancasila memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan dinamika masyarakat. Dalam konteks demokrasi, Pancasila merangsang kebaikan bersama, menciptakan harmoni inklusif, dan memperkuat identitas nasional. Kesadaran akan nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi dalam membangun kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama, menjadikan Pancasila sebagai jiwa dan kehidupan bangsa, jiwa kebersatuan. Kebersatuan dalam masyarakat perlu disimak dalam konteks dan fondasi seperti kestaun manusia dengan alam. kebersatuan bukanlah dalam konteks institusi melainkan kebersatuan dalam konteks seluruh realitas kehidupan manusia sehari-hari. Manusia yang ada bersama, menghormati perbedaan itulah makna atau nilai luhur ideologi Pancasila.

Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi dasar untuk mewujudkan cita-cita bersama, menghormati perbedaan, dan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Kesadaran ini membantu masyarakat Indonesia mempertahankan stabilitas politik dan memperkuat identitas nasional dalam kerangka demokrasi inklusif.<sup>16</sup> Pancasila menjadi pedoman dan pandangan hidup telah menjadikan bangsa Indonesia dapat memecahkan berbagai macam persoalan politik, ekonomi, budaya dan lain-lain yang muncul dalam dinamika perkembangan masyarakat yang semakin maju. Indonesia sudah seharusnya mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Pancasila lahir di tengah kesiapan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Dalam sidang I BPPK pada tanggal 1 juni 1945 Pancasila dijadikan dasar negara dengan maksud memiliki suatu falsafa yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Dengan jelas hal ini menekankan bahwa Pancasila menjiwai seluruh aspek kehidupan bangsa dan segala peraturan negara. Artinya seluruh kehidupan bangsa Indonesia dilandasi oleh semangat nilai luhur Pancasila. Pancasila bukan hanya ada dan hadir sebagai cara hidup tetapi lebih dari sebagai bentuk dialektika bersama masyarakat Indonesia. Pancasila dimengerti sebagai ideologi negara yang menjadi visi atau arah kehidupan masyarakat Indonesia yang menyatukan segala senis perbedaan dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang mengutamakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Pancasila memberikan makna luhur bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan bersama manusia Indonesia. Pancasila adalah dasar atau

---

<sup>15</sup> Machful and Indra Kurniawan, *Buku Ajar Mata Kuliah Demokrasi & HAM Indonesia Diterbitkan Oleh UMSIDA PRESS*, 2019.

<sup>16</sup> Andreas Doweng Bolo, "Demokrasi Di Indonesia: Pancasila Sebagai Kontekstualisasi Demokrasi," *Melintas* 34, no. 2 (2019): 145–67, <https://doi.org/10.26593/mel.v34i2.3389.145-167>.

filosofi bangsa Indonesia untuk menggapai cita-cita bersama dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian. Pancasila adalah jiwa dan hidup sanubari bangsa Indonesia. Anggapan ini benar karena sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan demokrasi Pancasila mencetuskan kebaikan bersama yang lahir dari rahim bangsa Indonesia itu sendiri.<sup>17</sup> Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang mengakar pada kesadaran identitas bangsa Indonesia. Uniknya, demokrasi ini tidak hanya bersifat rasional, melainkan juga religius, mencerminkan nilai-nilai keagamaan dalam pengambilan keputusan.<sup>18</sup> Bedanya dengan demokrasi konvensional, Pancasila tidak hanya menekankan kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan aspek sosial. Lebih jauh, demokrasi ini tidak hanya mengandalkan mayoritas sebagai penentu, melainkan juga menghargai dimensi kualitatif, di mana kebijaksanaan (wisdom) menjadi landasan. Dengan demikian, sistem ini menciptakan ruang bagi keberagaman dan keadilan, mempromosikan harmoni di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

## Pancasila Ikatan Bineka Tunggal Ika

Bineka Tunggal Ika (biar berbeda-beda tetapi tetap satu). Begitulah semboyan persatuan bangsa Indonesia.<sup>19</sup> Bineka tunggal ika mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Indonesia dan sekaligus merupakan prinsip hidup bersama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki kemajemukan baik dari sisi suku agama, etnis ras, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan. Kekayaan suku, agama, budaya dan banyak pulau merupakan keunikan yang menjadi milik bangsa Indonesia. Indonesia meskipun terdiri dari banyak pulau tetapi satu dan utuh. Keutuhan itu akan tetap terjaga jikalau masyarakat selalu aktif dalam menjaga keutuhan itu.<sup>20</sup> Bangsa Indonesia juga termasuk salah satu masyarakat yang paling problematis di dunia. Ada begitu banyak persoalan inheren dalam negara Indonesia yang bersumber dari keunikannya. Masalah persatuan dan kesatuan bukan hanya berkaitan dengan masalah konsep atau operasional saja melainkan masalah yang harus dijawab secara realistis. Sehingga tidaklah heran banyak para pakar politik maupun pemimpin yang tidak mampu berpikir secara kritis dan damai. Gerakan fundamentalis-radikalisme yang terjadi telah mencemaskan banyak pihak.<sup>21</sup> Gerakan ini melahirkan persoalan-persoalan yang berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi bersama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia karena negara ini tidak hanya terdiri atas satu golongan suku, ras, dan agama, tetapi banyak sekali golongan yang ada di tanah air kita tercinta. Negara ini hanya bisa bertahan dalam persatuan bila memberikan

<sup>17</sup> Valentinus Saeng, Pendidikan Pancasila, Diktat (Malang: Widya Sasana, 2016), 9.

<sup>18</sup> R Arie Febrianto and Didik Nugroho, "Implementasi Sila Ketiga Pancasila Butir Ke 6 Mengembangkan Persatuan Indonesia Atas Dasar Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Sehari-Hari Terkait Informasi Teknologi," *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 65–73.

<sup>19</sup> Idjang Tjarsono, Demokrasi Pancasila, Bhineka Tunggal, and Ika Solusi, "Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas.

<sup>20</sup> R. Arie Febrianto, Implementasi Sila Ketiga Pancasila Butir Ke 6 Mengembangkan Persatuan Indonesia Atas Dasar Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Sehari-Hari Terkait Informasi Teknologi, *Adil Indonesia Journal Volume 4 No 1 Januari 2023: 66-73.*

<sup>21</sup> Severinus Temi Laga Pancasila Ikatan Bineka Tunggal Ika, *Jurnal Filsafat teologi sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya sasana, Vol.46, No.2/2017.*

tempat yang pantas bagi keanekaragaman, mengedepankan solidaritas dan mengakui Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>22</sup>

Dalam konteks Indonesia perbedaan bukanlah hambatan melainkan sebagai bentuk keunikan bagi bangsa Indonesia. Dalam perbedaan setiap bebas untuk berpendapat dan mengembangkan sikap toleransi sebagai roh demokrasi yang tidak kalah pentingnya dengan komponen lain. Prinsip ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pluralisme, karena pluralisme dalam demokrasi melekat nilai yang mengakui menghormati serta menghormati perbedaan. Toleransi adalah perekat agar perbedaan tidak menjadi ajang pertarungan kepentingan yang saling mematikan diantara warga sehingga mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan mengembangkan sikap toleransi maka keluhuran nilai Pancasila tetap utuh dan terjaga. Kekayaan suku, bahasa, agama, budaya merupakan kemajemukan yang menjadi kekayaan bangsa.

Kemajemukan harus dikelola secara bijaksana agar kondusif bagi perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih terbuka dan demokratis.<sup>23</sup> Sesuai dengan semboyan Bineka Tunggal Ika akan menjadi panduan bagi bangsa Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Semboyan Bineka Tunggal Ika telah lama menjadi inspirasi bangsa Indonesia, dalam menghidupi dan menjalin relasi dengan yang lain. Konsep Bhineka Tunggal Ika menjadi dasar kesadaran identitas bagi bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bhineka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tapi tetap satu", menggarisbawahi pentingnya keberagaman sebagai kekuatan bersama. Dalam implementasinya, Bhineka Tunggal Ika menjadi panduan untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah perbedaan, menciptakan fondasi yang solid bagi pembangunan dan kemajuan negara Indonesia secara keseluruhan.

## Sila Ketiga Pancasila: Landasan Persatuan Bangsa

Berbicara tentang persatuan dalam konteks keanekaragaman bukanlah hal yang muda. Indonesia sangat terkenal akan suku agama dan budaya, dan di dalamnya bukan hanya Jawa, Sumatra Kalimantan tetapi Indonesia merupakan kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Hal ini mau menegaskan bahwa bangsa Indonesia berdiri dalam satu fondasi yang kokoh yakni Pancasila. Setiap kelompok budaya harus mampu mengintegrasikan Pancasila dalam kehidupan.<sup>24</sup> Prinsip kesatuan mencerminkan komitmen untuk mempertahankan persatuan dalam keragaman etnis, budaya, dan agama di negara ini. Persatuan sebagai unsur hakiki dari satu mengandung arti suatu keseluruhan yang utuh, tak terbagi, tidak terlepas. Sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," memiliki pengertian dan makna yang mendalam dalam konteks pembentukan identitas bangsa. Sila ini bukan sekadar simbol persatuan fisik, tetapi juga melibatkan persatuan dalam dimensi ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> A. Widyahadi, Pemuka agama dan Kepercayaan, Jakarta: sekretariat komisi PSE/KAJ kerja sama dengan LDD-KAJ dan komisi PSE-KWI, 2000, hlm 136.

<sup>24</sup> Luh Suryatni, "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

<sup>25</sup> Siti Elni and Dinie Anggraeni, "Pancasila Sebagai Senjata Generasi Muda," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (2021): 258–67, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.126>.

Indonesia, sebagai negara yang dirancang untuk inklusivitas, menekankan bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya adalah kekuatan, bukan kelemahan. Semboyan "*Bhineka Tunggal Ika*" biar berbeda-beda tetapi tetap satu mencerminkan semangat persatuan dalam keragaman. Prinsip musyawara dan mufakat dalam Pancasila menggaransi bahwa setiap suara didengar, mendorong partisipasi tanpa diskriminasi. "Persatuan Indonesia," menjadi dasar kuat untuk demokrasi inklusif, menangkal politik identitas yang dapat memecah belah. Menghargai keberagaman sebagai kekayaan, Indonesia berkembang sebagai bangsa yang adil, memberdayakan semua lapisan masyarakat, dan membangun persatuan kokoh di tengah perbedaan.

Persatuan Indonesia, dalam dimensi ideologis, mengajarkan nilai-nilai kesejahteraan umum, keberagaman, dan perdamaian dunia. Sila ini dinamis dan mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan, menciptakan fondasi yang inklusif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tantangan muncul dalam implementasi Sila ketiga, terutama dalam menjaga persatuan di tengah dinamika politik dan budaya. Implementasi sila ketiga perlu memperhatikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara agar mampu memelihara eksistensi bangsa dan negara.<sup>26</sup>

Dalam masyarakat demokratis, setiap individu dihormati tanpa memandang latar belakang biologis atau sosialnya, menciptakan kesetaraan martabat manusia. Demokrasi juga terkait erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memiliki keyakinan yang tidak dapat dipaksa oleh pihak manapun. Pentingnya pendidikan dalam masyarakat demokratis menjadi bagian integral dari Sila Ketiga. Pendidikan membuka peluang luas bagi warga negara untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, memperkuat dasar pemerintahan yang demokratis. Kesadaran bahwa kekuasaan aman saat berada di tangan rakyat menciptakan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan negara.<sup>27</sup> Selain itu, kesadaran akan perlunya kemampuan khusus untuk mengemban tanggung jawab pemerintahan menekankan pentingnya kompetensi dalam menjalankan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat rela mematuhi asalkan kebijakan tersebut tidak mencabut kebebasan, otonomi, dan martabat mereka.

Sila ketiga Pancasila sebagai lambang kesatuan menjadi perekat perbedaan keragaman yang terwujud dalam cinta tanah air yang memegang peran yang penting dalam memandu proses yang adil, demokratis, dan bermoral.<sup>28</sup> Makna sila ini mencerminkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam kerangka nasionalisme tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara terhadap negara. Peran Sila Ketiga dalam pembentukan identitas bangsa termanifestasi dalam upaya menjaga eksistensi bangsa dan negara. Sila persatuan menempatkan kesatuan yang menyelamatkan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sanggup berkorban untuk kepentingan bangsa dengan cara menghindari kekerasan, politik identitas dan ideologi yang memecah persatuan bangsa.

<sup>26</sup> Machful and Kurniawan, *Buku Ajar Mata Kuliah Demokrasi & HAM Indonesia Diterbitkan Oleh UMSIDA PRESS*.

<sup>27</sup> D B Wicaksono, "Demokrasi Pancasila Dalam Kontestasi Pemilihan Umum," *Jurnal Puspaka*, 2021, <http://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/wasbang/article/view/45%0Ahttp://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/wasbang/article/download/45/18>.

<sup>28</sup> Luh Suryatni, "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."



Sila Ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," menjadi pondasi dalam meraih suksesnya demokrasi inklusif dan sebagai bentuk pertahanan terhadap politik identitas. Prinsip ini mempromosikan kesatuan tanpa memandang perbedaan, menciptakan dasar kuat untuk inklusivitas. Dalam mencegah politik identitas, Sila Ketiga mendorong partisipasi setiap warga negara tanpa diskriminasi, mengurangi potensi konflik.<sup>29</sup> Dengan menghargai keberagaman dan merangkul prinsip Pancasila, demokrasi dapat berkembang dengan adil, memberdayakan seluruh masyarakat, dan menghadirkan persatuan yang kokoh di tengah keberagaman, memperkuat inti demokrasi tanpa terperangkap dalam polarisasi identitas.

## Politik Identitas: Ancaman Terhadap Kesatuan

Situasi politik bangsa Indonesia sejak awal berdirinya hingga saat ini tidak terlepas dari berbagai macam problem yang mengancam kesistensi kesatuan bangsa. Problem itu lahir dari ambisi untuk menguasai Indonesia berdasarkan suku agama, dan kelompok tertentu. Ambisi itu tentunya sangat bertentangan dengan realitas bangsa Indonesia yang pluralitas akan suku bahasa, agama dan budaya. Persoalan itu sering muncul secara trasparan juga tersamar yang tersembunyi dibalik ideologi pancasila. Menariknya meskipun upaya pemecah belah seperti politik identitas tidak mengikis ideologi pancasila, nyatanya hingga saat ini pancasila masih bertahan dan tepat menjadi pilar Indonesia dalam meningkatkan kesatuan bangsa. Pertanyaan filosofis bagi masyarakat Indonesia adalah apakah demokrasi pancasila akan menjamin kesatuan bangsa Indonesia? Kita mengetahui bersama dewasa politik identitas selalu muncul.

Politik identitas, sebagai fenomena sosial dan politik, muncul sebagai ancaman serius terhadap kesatuan Indonesia. Ketika individu atau kelompok fokus pada perbedaan identitas seperti suku, agama, kesatuan nasional dapat terkikis. Kontestasi identitas menciptakan polarisasi dan konflik, mengalihkan fokus dari kepentingan bersama menjadi perpecahan merugikan dan mengganggu harmoni hidup bersama. Budaya persaingan kompetisi saling menjatuhkan, di mana kelompok dengan pandangan berbeda dianggap tidak layak dan bertentangan. Realitas seperti ini meleset dari nilai demokrasi pancasila yang menjadi landasan bangsa. Ancaman terhadap keutuhan bangsa meningkat, tercermin dalam meluasnya praktik korupsi, tarik-menarik kepentingan di kalangan elite politik, dan politik yang menjadi ajang kepentingan diri. Politik identitas mengancam kesatuan Indonesia dengan menciptakan perpecahan berdasarkan suku dan agama. Kontestasi identitas merugikan, menggeser fokus dari kepentingan bersama.

Hal ini menciptakan ketidakstabilan yang mengancam fondasi negara. Perlu kesadaran untuk mengatasi polarisasi identitas dan memprioritaskan persatuan demi mencapai cita-cita demokrasi Pancasila yang adil dan makmur.

---

<sup>29</sup> Susanto Susanto, "Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara," *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2017): 44–52, <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1634>.

## Strategi Menangkal Politik Identitas

Dalam mencegah politik identitas, strategi utama adalah meningkatkan kesadaran akan nilai sila ketiga pancasila dalam masyarakat, memperkuat pendidikan mengenai persatuan, dan mendorong keterlibatan aktif dalam demokrasi, fokus pada kepentingan nasional untuk menjaga persatuan.<sup>30</sup> Strategi menangkal politik identitas dapat dilakukan dengan berbagai cara positif berdasarkan nilai positif berdasarkan pancasila. Penulis menawarkan dua langkah penting untuk menyadari nilai kesatuan dan terlibat dalam demokrasi yang berbasis pancasila. Langkah pertama untuk membangun kesatuan dalam masyarakat adalah meningkatkan kesadaran terhadap nilai pancasila. Hal praksis yang dilakukukan adalah pendidikan pancasila untuk mengajarkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kesejahteraan umum agar masyarakat dapat memahami dan menginternalisasikannya sebagai landasan utama bagi kehidupan berdemokrasi. Kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai pancasila akan membentuk dasar yang kuat untuk menjaga persatuan dalam keberagaman dan menghadapi potensi politik identitas.<sup>31</sup>

Kedua Mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi di dalam sistem politik adalah langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Dengan menghindari sikap egoisme dan korupsi, dapat diciptakan tatanan politik yang lebih transparan dan adil. Untuk mengeliminasi potensi politik identitas, perlu ditingkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai persatuan. Implementasi kebijakan inklusif dan pembukaan ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dapat menjadi langkah efektif untuk menjaga kesatuan dan meredam potensi politik identitas yang dapat mengancam stabilitas persatuan bangsa.<sup>32</sup>

Upaya menangkal politik identitas memerlukan kesadaran dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai nilai persatuan. Dengan memprioritaskan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, sistem demokrasi Pancasila dapat hidup dan mendorong peningkatan kesejahteraan serta keutuhan Indonesia. Melalui langkah ini, dinamika politik yang cenderung menuju politik identitas dapat diatasi dengan efektif. Kesadaran yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat membantu menciptakan atmosfer yang inklusif dan menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu kesadaran kolektif menjadi langkah strategis penting untuk memperkuat fondasi demokrasi Pancasila dan menghindari ancaman politik identitas. Dengan meningkatkan pemahaman nilai-nilai persatuan dan inklusivitas dalam masyarakat, dapat diciptakan ruang demokratis yang kuat dan stabil.<sup>33</sup> Kesadaran kolektif masyarakat menjadi benteng pertahanan terhadap upaya-upaya yang dapat merongrong keutuhan bangsa, menjaga prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan yang kuat dalam membangun harmoni dan keselarasan dalam kerangka demokrasi.

---

<sup>30</sup> Ratna Sari and Fatma Ulfatun Najicha, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 7, no. 1 (2022): 53–58, <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.

<sup>31</sup> Luh Suryatni, "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

<sup>32</sup> Elni and Anggraeni, "Pancasila Sebagai Senjata Generasi Muda."

<sup>33</sup> Artha Dwi Shafira, "Demokrasi Pancasila Artha Dwi Shafira Pawestri S1 Farmasi Iik Strada Indonesia," 2021.

## Sila Ketiga dalam dalam Menyukseskan Demokrasi Inklusif

Dalam konteks menyukseskan Demokrasi Inklusif, Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, menduduki peran sentral dalam membangun fondasi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai nilai ideal, Persatuan Indonesia tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi juga diwujudkan dalam nilai instrumental yang termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan negara. Nilai praktis sila ketiga tercermin dalam sikap saling menghargai, menjalin hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Menjunjung tinggi persatuan Indonesia, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Konstitusi Indonesia menegaskan hal ini melalui pasal-pasal yang mencerminkan esensi Persatuan.

Pasal 25A menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ciri khas Nusantara, menjelaskan batas wilayah dan hak-haknya yang diatur oleh undang-undang. Pasal 35 menetapkan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara, sementara Pasal 36 menetapkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. Lambang Negara, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diatur dalam Pasal 36A, dan Pasal 36B menetapkan lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Semua ini menunjukkan bagaimana Sila Ketiga tidak hanya menjadi nilai ideal, tetapi juga diwujudkan secara konkret dalam hukum dasar negara, memperkuat persatuan sebagai landasan Demokrasi Pancasila di Indonesia.<sup>34</sup>

Sila ketiga dalam konteks Demokrasi sebagai pilar utama membimbing pembangunan tatanan kehidupan ketatanegaraan yang bersifat inklusif, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan, dan hukum. Dengan memegang teguh Sila Ketiga, Indonesia merangkul keberagaman dan memastikan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi, menjadikan persatuan sebagai landasan yang kuat untuk mencapai kesuksesan demokrasi yang mewakili kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat.<sup>35</sup>

Dalam mencapai demokrasi yang inklusif, Sila Ketiga, Persatuan Indonesia juga menjadi pilar utama dalam memastikan partisipasi dan representasi seluruh rakyat. Sebagai negara kepulauan nusantara, batas wilayah dan hak-haknya diatur oleh undang-undang, memastikan keberagaman geografis dan etnis terakomodasi. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara memperkuat persatuan komunikasi di tengah keberagaman bahasa daerah. Semua perbedaan disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan semangat kesatuan dalam keberagaman.<sup>36</sup> Sila Ketiga tidak hanya sebagai nilai ideal, tetapi diimplementasikan secara konkret, memperkuat persatuan sebagai pondasi dalam menjalankan Demokrasi Pancasila. Sebagai ruh, sila ketiga mencerminkan keunggulan

<sup>34</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran and Badan Pengkajian MPR, *Penegasan Demokrasi Pancasila*, 2018, 60.

<sup>35</sup>Bolo, "Demokrasi Di Indonesia: Pancasila Sebagai Kontekstualisasi Demokrasi."

<sup>36</sup>Sujasmin Sujasmin, "Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat)," *Jurnal Wawasan Yuridika* 27, no. 2 (2012): 574–87.

dalam membangun sistem ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan, dan hukum.<sup>37</sup>

Demokrasi Pancasila bertujuan mencakup seluruh aspek kehidupan, memastikan praktek demokrasi di berbagai bidang, dengan perumusan kebijakan yang mematuhi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan umum warga negara. Pancasila bukan hanya sebagai ruh, melainkan harus terwujud dalam kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat daripada kelompok tertentu.<sup>38</sup> Rasa keadilan dan tanggung jawab negara menjadi landasan untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara. Aktualisasi Pancasila dan perumusan kebijakan menjadi krusial dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi, memastikan bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang beradab menjadi panduan utama. Melalui implementasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menikmati demokrasi yang inklusif, di mana kebijakan pemerintah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, serta menghindari kepentingan sempit yang dapat merugikan keutuhan bangsa.<sup>39</sup>

Pancasila, sebagai pilar utama negara Indonesia, memegang peran sentral dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip-prinsip Pancasila, yang diterapkan sebagai fondasi demokrasi, membawa dampak positif terhadap harmoni, kedamaian, dan pencegahan konflik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia telah mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan budaya hidup bersama, saling menghargai, tolong-menolong, dan bergotong royong. Keberagaman agama yang ada di Indonesia tercermin dalam kerukunan yang terjaga, menjadi bukti nyata bahwa Pancasila mampu menjadi pemersatu di tengah-tengah keberagaman tersebut.

Pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai kunci kesuksesan dalam Pemilu. Dengan mendasarkan demokrasi pada nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menciptakan sistem politik yang inklusif, memberikan ruang bagi partisipasi seluruh elemen masyarakat. Hal ini tidak hanya menciptakan proses politik yang adil, tetapi juga memastikan kelangsungan bangsa yang berlandaskan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar ideologi, melainkan instrumen praktis yang mendukung kehidupan demokratis yang sukses, menyatukan masyarakat dalam perbedaan, dan menjaga fondasi persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia.<sup>40</sup> Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia," memegang peranan utama dalam konteks ini. Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, sebuah prinsip krusial dalam menjalankan demokrasi inklusif. Pemahaman dan implementasi Sila Ketiga menjadi kunci untuk menciptakan atmosfer yang mendukung partisipasi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, agama, atau kepercayaan politik.

Pemilu 2024 merupakan panggung besar di mana nilai-nilai Pancasila diuji dan diimplementasikan. Partisipasi ini terwujud melalui pemilihan berkala yang dilakukan oleh

<sup>37</sup> Susanto, "Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara."

<sup>38</sup> Wicaksono, "Demokrasi Pancasila Dalam Kontestasi Pemilihan Umum."

<sup>39</sup> Arie Sujito, "Pancasila Dan Politik Emansipasi :," *Jurnal Pancasila* 3, no. 2 (2022): 13–32.

<sup>40</sup> Dhani Kurniawan, "Demokrasi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata Dan Yang Seharusnya," *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2016): 94–111, <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>.

wakil-wakil rakyat, di mana prinsip kesamaan politik menjadi dasar utama. Proses pemilihan ini dilakukan dalam suasana kebebasan politik, memastikan adanya ruang untuk ekspresi dan pengambilan keputusan yang mencerminkan aspirasi mayoritas. Dengan demikian, konfigurasi politik demokratis bertujuan mewujudkan pemerintahan yang responsif dan representatif terhadap kehendak dan kebutuhan masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap Sila Ketiga, masyarakat dapat mengatasi perbedaan dan bersatu dalam keragaman untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan demokrasi inklusif. Pembangunan demokrasi yang inklusif memerlukan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, dan Sila Ketiga menjadi pendorong utama untuk mengatasi potensi perpecahan dan membangun kesatuan.<sup>41</sup>

## KESIMPULAN

Sila ketiga pancasila, "Persatuan Indonesia," adalah fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi inklusif di Indonesia. Demokrasi yang inklusif mengacu pada partisipasi aktif semua elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Sila Ketiga menciptakan landasan kuat untuk membangun persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang kaya di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, Sila Ketiga memainkan peran kunci dalam menyatukan masyarakat yang beragam. Persatuan Indonesia yang diusung oleh Sila Ketiga mengajarkan pentingnya toleransi, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Demokrasi inklusif membutuhkan pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan kontribusi yang berharga dalam membangun bangsa. Sila Ketiga juga berperan dalam menangkal politik identitas yang dapat merusak demokrasi.

Dengan mengedepankan persatuan, sila ketiga mendorong masyarakat untuk melihat satu sama lain sebagai sesama anak bangsa, bukan berdasarkan perbedaan yang dapat memicu konflik. Politik identitas sering kali menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat, dan Sila Ketiga menjadi pagar pertahanan untuk melindungi demokrasi dari ancaman tersebut. Keberhasilan demokrasi inklusif dapat diukur dari sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi tanpa rasa takut, diskriminasi, atau ketidakadilan. Sila ketiga mendorong adanya ruang bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya tanpa dihakimi berdasarkan latar belakangnya. Dalam melibatkan semua elemen masyarakat, demokrasi menjadi lebih representatif dan mencerminkan keberagaman yang menjadi kekayaan Indonesia. Dengan demikian, sila ketiga Pancasila tidak hanya menjadi fondasi, tetapi juga pendorong utama dalam menjaga dan meningkatkan demokrasi inklusif di Indonesia.

## REFERENSI

- Bolo, Andreas Doweng. "Demokrasi Di Indonesia: Pancasila Sebagai Kontekstualisasi Demokrasi." *Melintas* 34, no. 2 (2019): 145–67.  
<https://doi.org/10.26593/mel.v34i2.3389.145-167>.
- B. Haryanto, "The Role of Pancasila Values in Shaping Indonesia's Foreign Policy: A Study of Indonesia's Relations with Neighboring Countries." *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(4), 2021, hlm, 567-583.

---

<sup>41</sup> Dwi Shafira, "Demokrasi Pancasila Artha Dwi Shafira Pawestri S1 Farmasi Iik Strada Indonesia."

- Cahyadi T. Krispuwana. *Yohanes Paulus II Tentang Keadilan dan Perdamaian* (Jakarta: Fidei Pres 2011).
- Dwi Shafira, Artha. “Demokrasi Pancasila Artha Dwi Shafira Pawestri S1 Farmasi Iik Strada Indonesia,” 2021.
- Elni, Siti, and Dinie Anggraeni. “Pancasila Sebagai Senjata Generasi Muda.” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (2021): 258–67. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.126>.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, and Badan Pengkajian MPR. *Penegasan Demokrasi Pancasila*, 2018.
- Febrianto, R Arie, and Didik Nugroho. “Implementasi Sila Ketiga Pancasila Butir Ke 6 Mengembangkan Persatuan Indonesia Atas Dasar Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Sehari-Hari Terkait Informasi Teknologi.” *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 65–73.
- Kusumohamidjojo Budiono. *Kebinekaan, masyarakat Indonesia, Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. (Jakarta Pt Grasindo, 2000).
- Keadilan, Jurnal Gema, and Edisi Iii. “Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi III, Desember 2022.” *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011)* 9, no. November (2022): 8.
- Kurniawan, Dhani. “Demokrasi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata Dan Yang Seharusnya.” *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2016): 94–111. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>.
- Luh Suryatni. “Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 34–47. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.101>.
- Machful, Oleh, and Indra Kurniawan. *Buku Ajar Mata Kuliah Demokrasi & HAM Indonesia Diterbitkan Oleh UMSIDA PRESS*, 2019.
- Sabilla, Annisa, and Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Ranah Politik.” *EduPsyCouns Journal* 3 (2021): 154–62.
- Sari, Ratna, and Fatma Ulfatun Najicha. “Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 7, no. 1 (2022): 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.
- Sujasmin, Sujasmin. “Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat).” *Jurnal Wawasan Yuridika* 27, no. 2 (2012): 574–87.
- Sujito, Arie. “Pancasila Dan Politik Emansipasi :” *Jurnal Pancasila* 3, no. 2 (2022): 13–32.
- Susanto, Susanto. “Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2017): 44–52. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1634>.
- Saeng Valentinus. *Pendidikan Pancasila, Diktat* (Malang: Widya Sasana, 2016).
- Temi Laga Severinus. *Pancasila Ikatan Bineka Tunggal Ika, Jurnal Filsafat teologi sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya sasana, Vol.46, No.2/2017*: 94-105.
- Riyanto Armada, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: kanisius, 2014).
- Riyanto Armada. *Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku teks, Liyan dan Fenomen*, (Yogyakarta: Kanisius 2018).
- Robinson Antonius Dieben. *Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi dan Spiritualitas Bangsa*

(Bekasi: Media Maksima 2021).

Wicaksono, D B. "Demokrasi Pancasila Dalam Kontestasi Pemilihan Umum." *Jurnal Puspaka*, 2021. <http://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/wasbang/article/view/45%0Ahttp://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/wasbang/article/download/45/18>.